

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sebab Pemerintah Australia mempertahankan Kebijakan *Operation Sovereign Border* (OSB). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analisis. Penelitian ini menunjukkan hasil Pro dari kebijakan yaitu Alasan Australia membentuk kebijakan Australia berupa *Pacific Solution* dan *Operation Sovereign Borders* (OSB) Pemerintah Australia dalam memandang gelombang para pencari suaka yang datang ke wilayahnya tidak lebih sebagai suatu tindakan yang ilegal dan identik dengan kriminalitas. Pemerintah Australia dari awal sudah mengidentifikasi para pencari suaka yang datang ke Australia dengan perahu adalah tindakan yang ilegal dan secara sengaja melanggar kedaulatan wilayah Australia. Kontra dari kebijakan yaitu berupa Dampak Kebijakan Australia Berupa *Operation Sovereign Border* (OSB) Terhadap Para Imigran *Operation Sovereign Borders* (OSB) Tindakan yang dilakukan Australia tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap HAM karena telah melanggar ketentuan mengenai hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk mencari suaka yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 DUHAM, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang diatur dalam Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICCPR), serta hak untuk tidak diusir atau dikembalikan (*non refoulement*) ke negara dimana terdapat bahaya ancaman penyiksaan yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951 dan Pasal 3 *Convention against Torture*(CAT).

Kata Kunci: **Kontroversi, Kebijakan Australia, Asylum Seekers**

ABSTRACT

The Aim of this study is to find out the reasons of Australian Government keeping the Operation Sovereign Border (OSB) as their Policy. The method used in the research is analytical descriptive method and historical method of analysis. This research shows the Pro results of the policy, namely the reason Australia forms Australia's policy in the form of Pacific Solution and the Australian Government Operation Sovereign Borders (OSB) in seeing no more asylum seekers coming to their territory. as an illegal act and synonymous with crime. The Australian Government has from the beginning identified asylum seekers coming to Australia by boat as illegal and deliberately violating the sovereignty of Australia. The contra of the policy is in the form of the Impact of Australian Policy in the Form of Operation Sovereign Border (OSB) on Operation Sovereign Borders (OSB) Immigrants The Australian action is a violation of human rights for violating provisions regarding the right to freedom of movement and the right to seek regulated asylum in Article 13 and 14 of the Universal Declaration, the right not to get torture or cruel, inhuman or degrading treatment is provided for in Article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICCPR), as well as the right not to be expelled or returned (non refoulement) to countries where there is a danger of the threat of torture stipulated in Article 33 of the 1951 Convention and Article 3 of the Convention against Torture (CAT).

Keywords: Controversy, Australian Policy, Asylum Seekers